

Pentingnya Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

Muh. Adzam ¹, Avita Ransi Etania ², Fikhri Aufi Alviyani ³

^{1,2,3} STIE YKP Yogyakarta

Korespondensi penulis: 7471080306970002@stieykp.ac.id

Abstract. *The aim of this research is to determine the level of importance of fiscal policy in supporting sustainable development and maintaining the stability of the Indonesian economy. The definition of fiscal policy is a series of actions taken by the government to maintain the stability of state expenditure and income with the aim of encouraging healthy economic growth. where in carrying out these actions the instruments used include: taxes, spending, public bonds and budget allocations. The research method used is a literature study of articles, journals and documents relevant to fiscal policy starting from taxation, APBN public bonds and budget allocations.. The data used is data from two previous researchers and financial projection data originating from credible government publications. The results obtained show that the important role of fiscal policy in supporting sustainable development is the government's right to regulate state revenues and expenditures in order to maintain the stability of the country's economy.*

Keywords: *Fiscal Policy, Sustainable Development, Economic Stability*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pentingnya kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Definisi kebijakan fiskal adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas pengeluaran dan pendapatan negara yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara sehat. di mana dalam melaksanakan tindakan ini meliputi instrumen yang digunakan antara lain: pajak, pengeluaran biaya, obligasi publik, dan alokasi anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur artikel, jurnal dan dokumen yang relevan dengan kebijakan fiskal mulai dari perpajakan, APBN obligasi publik dan alokasi anggaran. Data yang digunakan adalah data dari pihak kedua peneliti terdahulu dan data proyeksi keuangan yang berasal dari publikasi pemerintah yang kredibel. Hasil yang diperoleh bahwa peran penting kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah hak pemerintah dalam mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi negara.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Pembangunan Berkelanjutan, Stabilitas Perekonomian

LATAR BELAKANG

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. (Rantebua, 2020). Kebijakan fiskal didasarkan pada teori-teori ekonom Inggris John Maynard Keynes, yang menyatakan bahwa peningkatan atau penurunan pendapatan (pajak) dan tingkat pengeluaran mempengaruhi inflasi, lapangan pekerjaan dan aliran uang melalui sistem ekonomi suatu negara. (Dyah Cahyasari, 2019). Konsep ini telah menjadi landasan umum dalam tata kelola ekonomi global sejak perang dunia pertama pada tahun 1929 yang dikenal sebagai depresi besar. Di Indonesia sendiri penerapan kebijakan fiskal telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan dimulai dengan *Indische Contabilita* atau ICW pada tahun 1944 yang kemudian diadopsi oleh Pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan fiskal mulai dari masa Proklamasi

Kemerdekaan hingga Tahun 1997- 2003. Namun setelah tahun 2003 hingga saat ini kebijakan fiskal di Indonesia tidak lagi mengacu pada ICW 1944 tetapi lebih berdasarkan pada analisis kondisi ekonomi negara yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan pihak yang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Presiden. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat konsumsi investasi dan pengeluaran pemerintah dalam perekonomian yang membantu dalam menghindari fluktuasi ekonomi yang ekstrim seperti resesi dan inflasi yang berlebihan. Dasar hukum kebijakan fiskal tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa, kebijakan fiskal terkait anggaran negara atau APBN memiliki beberapa fungsi diantaranya otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas. (RI, 2003). Fungsi otorisasi mengacu pada penggunaan anggaran negara sebagai dasar untuk menjalankan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan pernyataan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 23 Ayat 1 yang berbunyi “Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-undang”. (jdih.kemenkeu, 2002).

Tujuan mengenai kebijakan fiskal itu sendiri adalah untuk mengelola suatu perekonomian negara secara sehat yaitu : menjaga stabilitas harga, meningkatkan lapangan pekerjaan dan SDM, mendorong laju investasi, mengembangkan pertumbuhan ekonomi negara, mewujudkan keadilan sosial. Perlu diketahui dalam penerapannya ada dua jenis kebijakan fiskal. Pertama kontraktif, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengendalikan tingkat inflasi dan mengurangi tingkat ketidaksetaraan ekonomi yang sering diukur dengan rasio gini yang melibatkan pengurangan belanja pemerintah dan meningkatkan tarif pajak. Kedua kebijakan fiskal ekspansif, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa sehingga perusahaan dapat menjaga produksinya dan menghindari pemecatan pekerja. Dua jenis penerapan kebijakan ini kondisional saling melengkapi menyesuaikan pada situasi perekonomian negara agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

METODE PENELITIAN

Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian studi literatur. Penulis menekankan pada analisis suatu fenomena atau kejadian sehingga hasil pengamatan bergantung pada ketajaman analisis penulis dalam mengolah kata dan mendefinisikan kejadian yang diamati. Objek yang diamati dalam penelitian ini bersifat alamiah. Tidak terjadi

perubahan keadaan objek baik sebelum dan sesudah dilakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data jenis sekunder melalui metode studi pustaka. Dengan mengumpulkan data-data informasi melalui dokumen-dokumen, baik tertulis, foto, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses kepenulisan. Penulis melakukan pengkajian isu terkait berbagai kebijakan fiskal untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan di berbagai literatur yang tersedia, seperti *website*, *booklet*, dan hasil penelitian terdahulu.

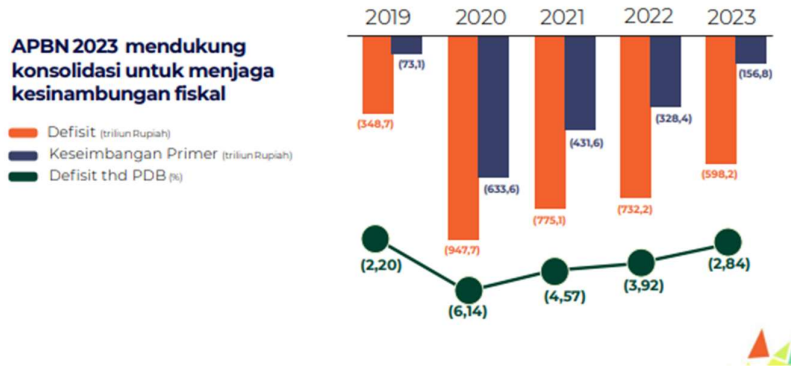
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada APBN Indonesia tahun 2023 dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” akan difokuskan untuk peningkatan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, reformasi birokrasi revitalisasi industri serta pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. Untuk mendorong efektivitas pelaksanaan kebijakan fiskal Tahun 2023 tetap dibutuhkan keberlanjutan reformasi struktural yang didukung dengan reformasi kebijakan fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas dan efisiensi belanja negara serta keberlanjutan pembiayaan anggaran. Dengan mengacu pada dasar perekonomian nasional dan tidak mengesampingkan pada tantangan perekonomian eksternal. Dapat kita saksikan bersama dalam satu dekade terakhir menurunnya kinerja perekonomian global. Paska terjadinya *Global Financial Crisis* (GFC) pada Covid-19 perang di Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global serta dampak perubahan iklim yang sekarang sedang terjadi di tengah guncangan-guncangan besarnya gejala perekonomian dunia. Ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga atas kerja keras dari seluruh pihak termasuk Pemerintah dan juga masyarakat. Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global bersama Tiongkok dan India rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2010-2019 sebelum pandemi menghantam dunia sebesar 5,4% jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7% juga jika dibandingkan dengan *emergency* ekonomi anggota G20 lainnya yang tumbuh rata-rata 3,7%.

Samuelson (2004) dalam (Jemi Juneldi, 2022) menjelaskan bahwa ukuran yang paling luas dari total *output* dalam suatu perekonomian adalah Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB). Di perekonomian Indonesia yang awalnya masuk dalam kategori 5 negara yang perekonomiannya rapuh bersama Brazil India Afrika Selatan dan juga Turki. Dalam posisi neraca berjalan kita mengalami defisit yang besar tahun 2013 dan kini telah berhasil keluar dari kelompok tersebut neraca berjalan menguat signifikan dari sebelumnya yakni defisit di 3,2 pada Juni 2013 menjadi surplus 0,3% PDB pada akhir tahun

2021 dan meningkat lagi menjadi surplus 1,0% PDB pada Desember 2022 tahun lalu dan diproyeksikan akan terjadi terus perbaikan defisit pembelanjaan negara di tahun berikutnya seperti grafik dibawah ini:

Grafik 1. Defisit, Keseimbangan Primer, Defisit terhadap PDB



Sumber: Informasi APBN 2023. Tim Kementerian Keuangan (2023)

Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang masif serta perbaikan iklim investasi dan bisnis yang terus dilakukan serta peningkatan program UMKM dan pengamanan kebutuhan medis pemerintah telah mendorong aktivitas ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global. Menjaga stabilitas ekonomi merupakan hal esensial yang harus dilakukan oleh pemerintah. Menurut Ames dkk. (2001) dalam (Jemi Juneldi, 2022). Dan dengan adanya dukungan dari pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian negara dengan melakukan perbaikan kebijakan fiskal yang relevan melalui APBN negara yakni dengan tiga fungsi dasarnya, alokasi, distribusi dan stabilitas. APBN diarahkan untuk mendukung transformasi laju perekonomian Indonesia yang ditempuh dengan pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) perbaikan sistem perpajak yang sehat dan adil yang diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan, optimalisasi PNPB didorong dengan peningkatan infrastruktur pelayanan publik dan pengelolaan secara berkelanjutan tentang keuangan dan aset negara secara optimal. (INDONESIA, 2023) Berikut grafik pendapatan, belanja, pembiayaan negara dan SBN:

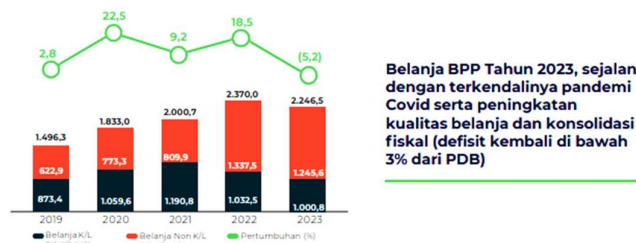
Grafik 2. Pendapatan Negara 2023



Sumber: Informasi APBN 2023. Tim Kementrian Keuangan (2023)

Dengan adanya pemulihan ekonomi, peningkatan efektivitas (UU HPP) serta optimalisasi PNPB melalui inovasi layanan dan reformasi pengelolaan aset secara produktif pendapatan negara APBN tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun. Dengan kontribusi pendapatan negara utama berasal dari pajak dengan target pertumbuhan 5,0% atau Rp2.021,2 triliun dan PNPB diperkirakan mencapai Rp441,4 triliun Selanjutnya pada hibah APBN tahun 2023 sebesar Rp0,4 triliun sesuai dengan proyeksi hibah luar negeri yang terencana baik. Yakni dapat dilakukan karena adanya ketaatan wajib pajak serta penegakan UU HPP.

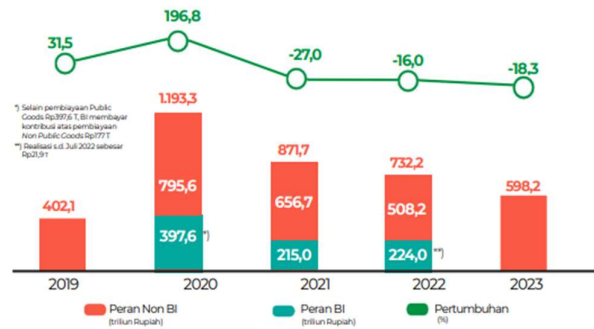
Grafik 3. Belanja BPP Tahun 2023



Sumber: Informasi APBN 2023. Tim Kementrian Keuangan (2023)

Belanja pemerintah pusat diproyeksikan pada APBN 2023 mencapai Rp2.246,5 triliun. Peningkatan kualitas belanja atau *spending butter* guna mendukung pembangunan perrkonomina yang berkelanjutan dalam penguatan reformasi struktural. pencapaian target pembangunan dan penyediaan fiskal buffer kebijakan yang ada dengan: adanya percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung transformasi ekonomi, mendukung revitalisasi industri dan juga mendukung adaptasi teknologi hijau yang terbarukan dengan pengembangan EBT serta transisi energi peningkatan ketetapan sasaran, meningkatkan efektivitas implementasi reformasi birokrasi, melanjutkan efisiensi belanja barang yang bersifat non prioritas, antisipasi mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN.

Grafik 4. Pembiayaan Anggaran 2023

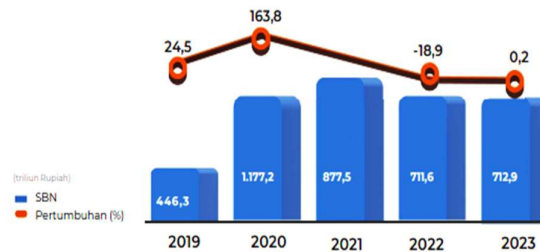


Sumber: Informasi APBN 2023. Tim Kementerian Keuangan (2023)

Seperti pada grafik yang disajikan pada data selain dari pembiayaan *Public Goods* Rp397,6 triliun. BI membayar kontribusi atas pembiayaan *Non Publik Goods* Rp177 triliun dengan realisasi s.d Juli 2022 sebesar Rp21,9 triliun. Diperlukan adanya regulasi kebijakan fiskal makro dalam jangka panjang dalam membantu pembiayaan negara terutama dalam tantangan utang dan juga investasi yang berkelanjutan serta dukungan produktivitas aktivitas ekonomi negara.

Grafik 5. Pembiayaan Utang (Defisit) melalui Penerbitan SBN Neto Sesuai Kebutuhan (Last Resort)

SBN 2019-2023 (Triliun Rupiah)



Sumber: Informasi APBN 2023. Tim Kementerian Keuangan (2023)

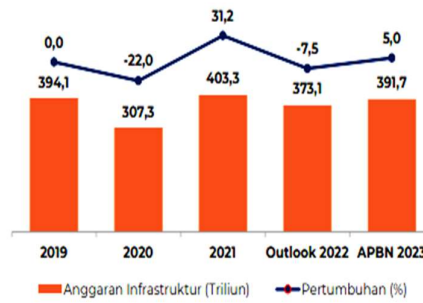
Data yang disajikan merupakan proyeksi pembiayaan defisit melalui penerbitan SBN netto sesuai dengan kebutuhan (*Last Resort*) arah dari kebijakan strategi pembiayaan utang merupakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang dikelola secara berurutan dan efisien serta *sustainable*. Pengalaman pasar untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian utang untuk menjaga keberlanjutan fiskal mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik dan luar negeri memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka fleksibilitas pembiayaan.

Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diproyeksikan dan ditopang permintaan domestic. Di tengah ketidakpastian kinerja perekonomian global, Indonesia

melakukan penguatan regulasi nasional dengan menyusun APBN tahun 2023 yang telah diresmikan menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 pada 27 Oktober tahun 2022 yang memiliki fokus peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Peran Indonesia sebagai salah satu negara anggota dari PBB yang telah berkomitmen untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang di planet ini. Komitmen itu tertuang dalam 17 tujuan SDGs yang saling berkaitan satu sama lain yang mendukung dan mengatasi berbagai tantangan global yang kita hadapi. Salah satunya pada poin ke-8 yakni, Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan diikuti pada poin ke-9, Industri, Inovasi dan Infrastruktur serta diikuti pada poin ke-17, Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan. Yakni di mana dalam menyiapkan perekonomian jangka Panjang negara Indonesia juga membuka jalan sebagai bentuk pelaksanaan perekonomian berkelanjutan dan inklusif . Didukung berbagai regulasi dan kebijakan fiskal dan didorong dengan elemen lain. Diantaranya siaran pers oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia SIARAN PERS HM.4.6/293/SET.M.EKON.3/08/2023 tentang Indonesia Perkuat Kemitraan Ekonomi Jangka Panjang untuk Rantai Pasok Global, Jakarta 11 Agustus 2023. dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia SP-49/KLI/2023 tentang Kebijakan Fiskal 2024 Diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Jakarta 19 Mei 2023.

Guna memperkuat fundamental ekonomi secara berkelanjutan pemerintah telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 19 Mei 2023 yang merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN tahun 2024 yang mengangkat tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian kedepan serta arah agenda pembangunan menjadi salah strategis pemerintah Indonesia melanjutkan Pembangunan infrastruktur prioritas sebagai media penanggulangan tantangan infrastruktur, pemenuhan layanan dasar, infrastruktur konektivitas dan transportasi, infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan ketersediaan lahan. Maka anggaran infrastruktur pada APBN 2023 sejumlah Rp392,0 triliun.

Grafik 6. Anggaran Infrastruktur 2023



Sumber: Informasi APBN 2023. Tim Kementerian Keuangan (2023)

Infrastruktur pelayanan dasar : rumah susun 5.397 unit dan rumah khusus 3.362 unit, Pembangunan sarpras pendidikan 801 unit sekolah, sistem penyediaan air minum dengan kapasitas 2.313,6 liter/detik. Infrastruktur untuk konektivitas : jalan baru 522 km, jalan bebas hambatan 94 km dan dukungan JTTS, jembatan baru 13.684 m, flyover/underpass/terowongan 2.259 m, jalur kereta api 6.627 km²sp, bandara baru 6 lokasi. Infrastruktur energi dan pangan : pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang tahap satu 62,4 km, pembangunan jaringan irigasi 6.900 Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi 98700 Ha, pembangunan bendungan baru 7 unit, pembangunan PLTS terpadu di wilayah 3T 12 unit, Infrastruktur TIK : penyediaan BTS/Lastmile di 332 lokasi, penyediaan akses internet baru 9.755 lokasi, penambahan kapasitas satelit sebesar 8 Gbps.

KESIMPULAN

Pentingnya kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi ketidakpastian pertumbuhan ekonomi baik secara domestik dan global di tahun 2023 dimaksimalkan pemerintah untuk menjaga penguatan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan strategi pemerintah dalam rangka peningkatan produktivitas dengan melanjutkan penguatan reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, ekonomi hijau. Dan menyangkut pada peran Indonesia sebagai negara anggota PBB yang telah berkomitmen pada 17 poin SDGs yang saling berkaitan satu sama lain yang mendukung dan mengatasi berbagai tantangan global yang kita hadapi. Dengan melakukan kerja sama dalam pelaksanaan dengan negara lain sebagai wujud pelaksanaan pembangunan berkelanjutan perlu didukung dengan penyiapan infrastruktur yang menunjang kemitraan secara global. Sehingga perekonomian negara dapat terjaga stabilitasnya dan dapat menghindari fluktuasi ekonomi yang ekstrem baik berupa inflasi atau resesi.

SARAN

Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 pastinya akan ditopang dari permintaan domestik dan didukung dengan adanya peningkatan produktivitas transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk menghadapi ketidakpastian mengenai perekonomian secara global pemerintah harus lebih proaktif dalam meningkatkan produktivitas dengan melanjutkan penguatan perbaikan struktural infrastruktur dan regulasi yang relevan dengan mewujudkan APBN yang kredibel, transparan, dan akuntabel yang selanjutnya masyarakat agar dapat memberikan umpan balik terhadap kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- Dyah Cahyasari, S. (2019). Kebijakan Fiskal. In S. Dyah Cahyasari, *Modul Kebijakan Fiskal* (p. 1). Jakarta: Stiami Electronic Learning Laboratory.
- INDONESIA, K. K. (2023). *APBN 2023*. Jakarta: KEMENTERIAN KEUNGAN REPUBLIK INDONESIA.
- Indonesia, K. K. (2023). *Buku Nota Keuangan II Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- jdih.kemenkeu. (2002, Desember 1). *Undang-Undang Dasar 1945*. Retrieved from jdih.kemenkeu.go.id:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM>
- Jemi Juneldi, S. U. (2022). Efek Variabel Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Inflasi, . *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 4, nomor 2, .
- Limanseto, H. (2023). Indonesia Perkuat Kemitraan Ekonomi Jangka Panjang untuk Rantai Pasok Global. *KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA* (p. 1). Jakarta Pusat: Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Rantebua, S. (2020). Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 3.
- RI, B. (2003, Desember 14). *Undang-Undang No.17 Tahun 2003*. Retrieved from Database Peraturan: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- SDGs, S. N. (2023, Januari 1). *Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua*. Retrieved from sdgs.bappenas.go.id:
<https://sdgs.bappenas.go.id/id/17-goals/goal-8/>
- Surjantoro, D. (2023). Kebijakan Fiskal 2024 Diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang . *KEMENTERIAN KEUNGAN REPUBLIK INDONESIA* (pp. 1-3). Jakarta: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.